

**PENGARUH OTONOMI KEUANGAN, AKUMULASI  
SURPLUS DAN SILPA TERHADAP PERUBAHAN  
ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA  
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Tahun 2017-2020)

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi*

*Universitas Negeri Padang*



Oleh :

Randhi Dwi Putra

18043044/2018

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH OTONOMI KEUANGAN, AKUMULASI SURPLUS DAN SILPA  
TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  
PADA PEMERINTAH DAERAH**

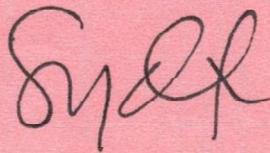
Nama : Randhi Dwi Putra  
NIM / TM : 18043044 / 2018  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

**Padang, Maret 2023**

Disetujui Oleh

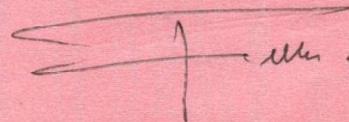
**Ketua Departemen Akuntansi**

**Pembimbing**



**Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D**

**NIP. 19800103 200212 2 001**



**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

**NIP. 19730213 199903 1 003**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**Judul** : Pengaruh Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus dan SiLPA  
Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada  
Pemerintah Daerah

**Nama** : Randhi Dwi Putra

**NIM / TM** : 18043044 / 2018

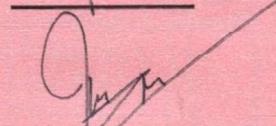
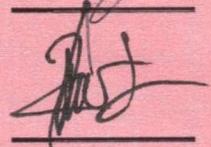
**Program Studi** : Akuntansi

**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Maret 2023

**Tim Penguji,**

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	1. 
2	Anggota	Dr. Erinos NR, M.Si, Ak	2. 
3	Anggota	Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Randhi Dwi Putra  
NIM/Tahun Masuk : 18043044/2018  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 13 Juni 1999  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Lubuk Gading IV Blok J No. 03, Lubuk Buaya, Padang  
No. HP/Telp : 081347832350  
Judul Skripsi : Pengaruh Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus dan SiLPA Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Maret 2023  
Saya yang Menyatakan

Randhi Dwi Putra  
18043044/2018

## **ABSTRAK**

**Putra, R.D & Arza, F.I. (2022). Pengaruh Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus dan SiLPA Terhadap Perubahan Belanja bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Tahun 2017-2020).**

**Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh otonomi keuangan, akumulasi surplus, dan SiLPA. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 51 kecamatan dengan periode 4 tahun. Metode statistik menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi keuangan, akumulasi surplus, dan SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran bantuan sosial.

**Kata Kunci : Otonomi Keuangan; Akumulasi Surplus; SiLPA; Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita sepanjang zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus, dan SiLPA Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah” (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Tahun 2017-2020). Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulisan ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, Papa Rainil Okviandri, Mama Irmawati dan Abang Jefri Pratama yang telah memberikan dukungan moril dan materil, do'a, semangat, dan kasih sayang tak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing yang telah sangat sabar membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini, serta menjadi motivator bagi saya.

3. Bapak Dr. Erinos NR, M.Si., Ak dan Ibu Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA selaku Ketua Jurusan dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
7. Ibu Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Taher, dkk yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan, penyusunan skripsi, seminar proposal sampai dengan sidang skripsi.
10. Teman-teman kontrakan Wandu, dkk yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan, penyusunan skripsi, seminar proposal sampai dengan sidang skripsi.

11. Seluruh teman-teman Akuntansi kelas B 2018 yang telah memberikan dukungan dan semangat, semoga kita semua sukses.
12. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu, mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih Sheryn Salsabila As-Syifa S.Pd atas segala hal dan bantuan yang telah diberikan kepada saya dengan ikhlas dan besar hati, memberikan semangat disaat malas dan bersedia mendengarkan seluruh keluh kesah terutama pada saat proses penyusunan skripsi ini.
14. Terima kasih juga kepada diri sendiri yang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi meskipun banyak rintangan dan cobaan, tetapi penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Semoga seluruh bimbingan, bantuan, dukungan, doa, serta motivasi yang diberikan tidak sia-sia dan semoga Allah memberikan imbalan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan mengharap saran dari pembaca. Harapannya, semoga skripsi ini dapat dijadikan salah satu rujukan/pelajaran dalam penulisan skripsi yang lebih baik lagi.

Padang, Maret 2023

Randhi Dwi Putra

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Teori Agensi.....	13
1. Teori Agensi.....	13
2. Anggaran Sektor Publik.....	15
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	21
4. Perubahan Anggaran.....	26
5. Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial.....	28
6. Otonomi Keuangan .....	30
7. Akumulasi Surplus.....	32
8. SiLPA.....	33
B. Penelitian Terdahulu .....	35
C. Pengembangan Hipotesis .....	37
D. Kerangka Konseptual .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Desain dan Jenis Penelitian .....	45
B. Populasi dan Sampel .....	45
C. Jenis dan Sumber Data .....	47

D. Metode Pengumpulan Data .....	48
E. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	48
F. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Umum .....	61
B. Analisis Deskriptif.....	65
C. Analisis Induktif.....	67
D. Pembahasan .....	77
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Keterbatasan .....	87
C. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	89
LAMPIRAN.....	92

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel .....	46
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	62
Tabel 4.2 Tingkat Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial .....	63
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif .....	65
Tabel 4.4 Uji Normalitas.....	68
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas .....	69
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas Metode White.....	69
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson.....	70
Tabel 4.8 Tabel Model Regresi Panel .....	71
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi .....	74
Tabel 4.10 Uji t Parsial.....	76

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Proses Penyusunan APBD .....	26
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual .....	44

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mewujudkannya, diperlukan strategi-strategi dengan pertimbangan pasar eksternal, lingkungan teknologi dan ekonomi. Salah satu faktor bentuk dari implementasi ide dan strategi tersebut adalah melalui proses penganggaran. Anthony & Govindarajan (2005) mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran berfungsi sebagai bentuk penegakkan tanggung jawab manajemen dan pelaksanaan akuntabilitas eksternal.

Pada organisasi sektor publik, anggaran erat kaitannya dengan akuntabilitas/pertanggung jawaban terhadap publik. Hyde (1992) menyatakan bahwa penganggaran pada sektor publik bersifat elektrik-multidimensional, artinya penganggaran sektor publik mencakup area mencakup sifat yang secara umum seperti mencatat hasil kebijakan, merangkum prioritas kebijakan, tujuan program serta sasarannya; dan menggambarkan upaya layanan total pemerintah; pengukuran kinerja, dampak dan efektivitas keseluruhan. Membuktikan bukti bahwa anggaran sektor publik menjadi dasar kebutuhan bagi pemerintah dalam melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat.

Anessi-Pessina *et al.*, (2012) mengatakan perubahan anggaran dan penganggaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan terutama pada

perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Data tersebut diambil dari Kota Italia untuk menguji hipotesis tentang penyebab utama dari perubahan anggaran, menyebabkan perubahan anggaran sangat dipengaruhi oleh tingkat inkremental dalam proses penyusunan anggaran awal, serta oleh beberapa faktor internal seperti fiscal stress, varians anggaran dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran. Perubahan anggaran juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi keuangan dan politik (Agus Purwanto, 2016), *budgeting and rebudgeting in local governments: siamese twins?* (Anessi-pessina *et al.*, 2012).

Lu dan Facer (2004) percaya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran adalah variabel status keuangan pemerintah dan sumber daya yang lemah, ketika otonomi fiskal berupa pendapatan asli daerah (PAD) lebih tinggi, perubahan anggaran lebih kecil, dan revisi tahun sebelumnya lebih tinggi, dan perubahan anggaran lebih kecil, ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Purwanto, 2016), yang menyatakan bahwa dalam hal ini otonomi keuangan adalah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan realisasi pendapatan total. Variabel otonomi keuangan berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk rencana kerja pemerintah

daerah selama satu tahun dalam bentuk satuan moneter, yang disampaikan oleh pihak eksekutif setiap tahunnya dengan memberikan informasi rinci kepada publik dan legislatif (Mardiasmo, 2002). APBD disusun satu tahun sebelum pelaksanaannya, maka akan terjadi penyesuaian selama tahun berjalan.

Forrester *et al.*, (1992) mengemukakan bahwa setelah anggaran ditetapkan akan terjadi suatu perbedaan antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan jumlah yang dibutuhkan selama anggaran tersebut dilaksanakan, sebab dalam anggaran yang disusun pada suatu periode tidak sepenuhnya dapat memenuhi atau menangkap kebutuhan organisasi, hal ini dikarenakan anggaran disusun berdasarkan asumsi dan estimasi, jadi pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan tidak selalu berjalan lancar sesuai yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian berupa perubahan anggaran.

Di banyak kota, perubahan anggaran merupakan faktor umum dan penting dalam proses penganggaran (Forrester *et al.*, 1992). Perubahan anggaran merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya agar sesuai dengan perkembangannya. Perkembangan tersebut dapat berakibat pada peningkatan anggaran pendapatan penerimaan dan belanja pengeluaran, dan begitu pula sebaliknya. Walaupun perubahan anggaran merupakan faktor umum dan pasti terjadi pada pemerintah daerah perubahan anggaran sendiri memiliki masalah keagenan pada para pembuat kebijakan anggaran. Praktik perubahan anggaran menjadi sarana bagi

legislatif dan eksekutif untuk saling menyesuaikan kepentingan masing-masing, sehingga proses penganggaran maupun perubahan anggaran tidak selalu mencapai proses yang lebih rasional.

Proses penganggaran dan perubahan anggaran menjadi ajang adu *power* masing-masing pihak dalam menentukan arah, kebijakan, maupun strategi saat proses penganggaran dan perubahan anggaran, hal ini menyebabkan seringkali mengorbankan kepentingan publik. Selain itu perubahan anggaran yang telah dilakukan tidak dijalankan secara rinci dan tidak tercantum pada laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat tidak mengetahui latar belakang terjadinya perubahan dalam setiap komponen APBD dan akibatnya masyarakat tidak dapat secara efektif mengontrol dan mengawasi pelaksanaan APBD, sebab proses pembahasan dan penetapan anggaran perubahan relatif tertutup dari pengamatan publik sehingga terdapat persoalan keagenan yang besar.

Perubahan pada setiap elemen APBD memiliki latar belakang yang berbeda, baik untuk perubahan anggaran pendapatan maupun perubahan anggaran belanja (Abdullah & Nazry, 2015). McCaffrey (1999) menyatakan bahwa dalam fungsi pengendalian, manajemen sering memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan anggaran pada proyek atau kegiatan agar sesuai dengan perkembangan di lapangan. Forrester *et al.*, (1992) menyebutkan bahwa perubahan pada komponen belanja sering diartikan sebagai perubahan terpenting pada anggaran pemerintah dan sektor publik lainnya, karena anggaran belanja merupakan parameter kualitas

pelayanan publik yang dapat diberikan dan merupakan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, karena masalah keagenan, anggaran belanja menjadi komponen yang diperhatikan oleh pihak eksekutif dan legislatif dalam menunjukkan *self interestnya*. Pihak eksekutif akan memanfaatkan perannya sebagai pihak yang memiliki informasi paling banyak seperti untuk mengusulkan anggaran yang lebih besar atau lebih kecil dari target (*budgetary slack*). Berbeda dengan legislatif, legislatif memiliki *decretionary power* untuk mengusulkan, mengubah, atau menolak anggaran. Contohnya ketika bantuan luar negeri ditunjukkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, mereka akan menggeser alokasi dana yang sebelumnya sudah disiapkan untuk sektor pendidikan ke sektor lain, namun ketika bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung investasi publik, mereka tetap mempertahankan alokasi dana yang telah disiapkan untuk investasi tersebut.

Dilansir dari [dkpd.sumbarprov.go.id](http://dkpd.sumbarprov.go.id), terjadi keterlambatan penetapan pada Perda APBD karena masalah konflik kepentingan dalam pembahasan APBD terkait belanja bantuan sosial. DPRD selaku lembaga legislatif bersikeras meminta alokasi dana bansos-hibah sebagai dana aspirasi sebesar 2 miliar rupiah per anggota yang disalurkan pada konstituen dalam berbagai program, selain itu pemerintah daerah sebagai eksekutif dinilai mementingkan ego pribadi atau kelompok dengan tidak menampung program strategis dan prioritas SKPD. Program strategis tersebut seperti program jaminan Kesehatan Nasional. Akibatnya banggar DPRD dipaksa mencari

alokasi anggaran untuk program prioritas tersebut, atau dengan kata lain program yang seharusnya dapat dialokasikan pada belanja bantuan sosial, harus dilakukan rasionalisasi belanja di SKPD. Perdebatan tersebut mengakibatkan alokasi belanja bantuan sosial untuk perseorangan dinolkan oleh DPRD dan kembali dianggarkan pada saat APBD perubahan, hal ini dilakukan agar pengesahan dapat segera dilakukan. Dengan hal tersebut, tentunya perubahan APBD yang dilakukan di kemudian hari tidak sesuai dengan konsep ideal penganggaran dan tidak memiliki perencanaan yang bagus.

Proses berkelanjutan dari pelaksanaan anggaran dan perubahan anggaran, terutama perubahan anggaran belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah menghasilkan persetujuan anggaran, yang juga merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan manajemen, inilah yang menyebabkan perubahan pada komponen anggaran belanja, termasuk belanja bantuan sosial memiliki keterkaitan dengan beberapa variabel atau faktor yang mempunyai pengaruh atas proses dalam anggaran tersebut (Annesi-Pessina *et al.*, 2012).

Penelitian ini merujuk pada riset-riset terdahulu yang telah melakukan studi terkait berbagai variabel yang mempengaruhi perubahan anggaran maupun perubahan anggaran belanja, diantaranya penelitian Annesi-Pessina *et al.*, (2012). Abdullah & Rona (2014), Purwanto (2016), Junita & Abdullah (2016), dan Afrah *et al.*, (2018). Annesi-Pessina *et al.*, pada tahun 2012 melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *re-budgeting*.

*Re-budgeting* atau perubahan anggaran yang difokuskannya adalah perubahan anggaran belanja. Dalam penelitiannya faktor yang mempengaruhi *re-budgeting* terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri atas fitur organisasi dan kondisi keuangan pemerintah daerah. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas variabel politik dan lingkungan sosial ekonomi setempat. Hasilnya *re-budgeting* dipengaruhi oleh *degree of incrementalism* dalam proses penyusunan anggaran awal, selain itu juga faktor internal dan eksternal lainnya, seperti variabel politik, fitur organisasi, kondisi keuangan dan lingkungan sosial ekonomi setempat.

Hal serupa juga dilakukan oleh Purwanto A. pada 2016 yang meneliti tentang pengaruh kondisi keuangan dan politik terhadap perubahan anggaran pada pemerintah daerah di Indonesia. Serupa dengan Annesi-Pessina *et al.*, (2012), perubahan anggaran yang difokuskan pada penelitian tersebut adalah perubahan anggaran belanja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan yang terdiri atas otonomi keuangan, akumulasi surplus, revisi surplus dan kondisi politik yang diwakili oleh fragmentasi politik dan tahun sejak pemilu berpengaruh terhadap perubahan APBD Kabupaten/kota di Indonesia.

Serupa dengan itu, Afrah *et al.*, (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh varians anggaran terhadap perubahan anggaran dengan variabel ukuran legislatif sebagai pemoderasi, dan menyatakan bahwa varian pendapatan dan varians pengeluaran berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja dengan diperkuat atau tidaknya oleh ukuran legislatif.

Selain itu, Junita & Abdullah (2016) melakukan studi tentang pengaruh tekanan fiskal dan ukuran legislatif terhadap perubahan anggaran. Hasilnya, variabel ukuran legislatif memiliki berpengaruh positif terhadap perubahan belanja dan tekanan fiskal memiliki pengaruh negatif.

Berbeda dari penelitian-penelitian di atas, Abdullah & Rona (2014) melalui penelitiannya, hanya melakukan studi terhadap faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran dan fokus pada faktor internalnya saja. Faktor-faktor tersebut adalah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan SiLPA. Hasilnya Abdullah dan Rona (2014) membuktikan bahwa faktor internal tersebut berpengaruh terhadap perubahan belanja modal.

Penelitian ini menggunakan variable-variabel yang mengacu pada penelitian Annesi-Pessina *et al.*, (2012), Abdullah & Rona (2014) dan Junita & Abdullah (2016). Fokus penelitian ini adalah pertama, penelitian ini mencoba untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan belanja bantuan sosial. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan perubahan total belanja, belanjaan modal dan belanja barang jasa. Kedua, Pemerintah kabupaten atau kota di Sumatera yang digunakan sebagai objek pengamatan, digunakan untuk menindaklanjuti saran penelitian terdahulu, yaitu dengan memperluas objek penelitian Junita & Abdullah (2016) dan Afrah *et al.*, (2018), yang hanya melakukan studi pada salah satu provinsi di pulau Sumatera. Ketiga, penelitian ini mencoba memfokuskan studi dengan menggunakan faktor-faktor internal Pemerintah Daerah yang mempengaruhi perubahan anggaran

belanja dan sosial. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak menggabungkan faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal tersebut merujuk pada penelitian Annesi-pessina *et al.*, (2012), Abdullah & Rona (2014) dan Junita & Abdullah (2016) yang merupakan faktor keuangan internal pemerintah daerah. Variabel yang peneliti gunakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah adalah otonomi keuangan, akumulasi surplus dan selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004: 379) Otonomi keuangan adalah segala hal tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam kegiatan penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan. Pemerintah daerah di Indonesia melakukan penyesuaian anggaran setiap tahun. Perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran, seperti otonomi keuangan, untuk memberikan APBD yang terbaik dan memberikan kesejahteraan yang baik kepada masyarakat (Purwanto, 2016). Anggaran merupakan perkiraan kinerja yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang ditentukan dalam ukuran finansial.

Variabel akumulasi surplus dapat mempengaruhi perubahan anggaran belanja bantuan sosial melalui terakumulasinya surplus ditahun-tahun sebelumnya lebih besar dalam penganggaran awal sehingga dibutuhkan perubahan anggaran yang besar juga (Purwanto Agus, 2016). Penelitian yang

dilakukan oleh Bertha Abadiarti (2014) menemukan bahwa akumulasi surplus mempunyai pengaruh positif terhadap variabel perubahan anggaran belanja bantuan sosial, semakin tinggi akumulasi surplus dalam keuangan daerah, maka semakin tinggi perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, SiLPA merupakan surplus dari realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran selama suatu periode anggaran. SiLPA dapat digunakan sebagai sumber pendapatan internal pemerintah daerah dan dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun berjalan. Abdullah & Rona (2014) menemukan bahwa perubahan yang terjadi pada SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja. Didukung penelitian Rizqiyati *et al.*, (2019) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka perlu dikaji faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perubahan anggaran pada anggaran belanja bantuan sosial untuk meningkatkan kualitas anggaran pemerintah daerah sehingga memberikan manfaat untuk masyarakat. Riset perubahan anggaran belanja secara umum belum membuahkan hasil yang konsisten, khususnya perubahan anggaran belanja bantuan sosial masih sedikit dilakukan, maka judul yang peneliti ajukan pada penelitian ini adalah “PENGARUH OTONOMI KEUANGAN, AKUMULASI SURPLUS DAN SiLPA TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA PEMERINTAH DAERAH”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari paparan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah otonomi keuangan dapat mempengaruhi perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera?
2. Bagaimanakah akumulasi surplus dapat mempengaruhi perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera?
3. Bagaimanakah SiLPA dapat mempengaruhi perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh otonomi keuangan terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera.
2. Untuk menguji pengaruh akumulasi surplus terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera?
3. Untuk menguji pengaruh SiLPA terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara rinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai alat untuk mengembangkan intelektual dalam berpikir ilmiah dan pemecahan masalah serta menambah pemahaman tentang kapasitas fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

##### 2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah, baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

##### 3. Bagi Akademisi

Sebagai rujukan dan data tambahan bagi penelitian lain dalam bidang sejenis.